



Puskesmas dilarang tolak Jampersal

Rina Wijayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA—Peraturan pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Jogja telah selesai dibuat. Kini ibu hamil peserta Jampersal akan dilayani persalinannya secara gratis dan Puskesmas dilarang menolak pasien.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Tuty Setyowati menjelaskan regulasi pelaksanaan Jampersal di Kota Jogja berupa Peraturan Walikota (Perwal) No.56/2011 tentang Pengaturan Pelayanan Persalinan Puskesmas.

Tuty menjelaskan produk Perwal tersebut merupakan turunan dari Perda No.3/2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Menurut Tuty dalam cakupan Perda itu pula terdapat klausul tentang pembebasan biaya.

Tuty mengatakan regulasi itu diharapkan mampu menjadi payung hukum pelaksanaan Jampersal. Sehingga, tegasnya, tidak ada alasan bagi Puskesmas untuk menolak pasien Jampersal.

"Sekarang regulasinya sudah ada, sehingga jangan sampai ada Puskesmas yang menolak warga Jampersal, karena sudah ada payung hukum yang jelas," katanya dalam jumpa pers, di Balaikota, Senin (18/7).

Tuty melanjutkan dalam Perwal bab II pasal 2 menyebut aspek pengurangan biaya. Sementara nilai pengurangan tersebut disesuaikan dengan besaran dari aturan Permenkes. Siasanya, jelas Tuty akan dipenuhi oleh anggaran Jamkesmas daerah.

Sementara dalam Permenkes No.631/2011 tentang Juknis Jaminan Persalinan, kata Tuty, biaya persalinan normal Rp350.000 dan biaya persalinan dengan penyulit senilai Rp500.000. Dengan aturan tersebut ibu hamil yang mengikuti Jampersal dilayani secara gratis dengan pemenuhan biaya persalinan dilakukan dengan dana Jamkesmas daerah.

Tuty menegaskan program Jampersal ini dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Sehingga ada mekanisme yang harus dipahami masyarakat. Di antaranya melakukan pemeriksaan pada tingkat Puskesmas, serta diberikan rujukan bagi ibu melahirkan dengan penyulit.

Siap tenaga medis
Terpisah Kepala Puskesmas Tegalorejo Prignyawati mengaku siap menerima pasien Jampersal. Dia menjelaskan di kecamatannya sudah memiliki kecukupan tenaga medis.

Prignyawati mengatakan pihaknya tidak akan menolak dan membedakan pelayanan Jampersal.

Sepanjang 2011 ini diakuinya telah tercatat tiga warga melakukan persalinan dengan Jampersal. Ketiganya tercatat tidak memiliki satu pun layanan kesehatan baik Jamkesmas maupun Jamkesda.

"Kami siap melakukan Jampersal, baik dari segi tenaga medis maupun layanan. Kami juga tidak akan membedakan dalam memberikan layanan," tandasnya.

Sebelumnya sejumlah Puskesmas sempat memersalahkan pasien Jampersal. Pasalnya, belum ada payung hukum yang mengatur masalah itu di Kota Jogja.

urkan Kepada Yth. :
 Walikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 Asisten

usan Kepada Yth. :

- Instansi
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Lanjut

anggapi

ketahui

Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005